

PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Muhammad Akmal Rasyid^{1*}, Fikri Radiatus Solihin², Apriliantoni³

^{1,2,3}) Universitas Islam “45” Bekasi

Akmalrasyid020504@gmail.com¹, solihinfikri858@gmail.com², apriliantoni@gmail.com³

ABSTRACT

EkonomiUtang luar negeri telah menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia sejak krisis ekonomi 1997–1998. Dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 hingga 2021 diteliti dalam studi ini. Analisis regresi digunakan dalam studi ini untuk menilai bagaimana utang luar negeri mempengaruhi metrik ekonomi termasuk PDB, inflasi, dan nilai tukar. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun utang luar negeri dapat berkontribusi pada ekspansi ekonomi dalam jangka pendek, utang tersebut juga dapat menimbulkan ancaman jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri dapat membuat kebijakan fiskal yang berkelanjutan menjadi lebih sulit. Menurut studi ini, untuk mengurangi risiko yang terkait dengan utang luar negeri, manajemen utang yang ketat dan penguatan sektor domestik diperlukan.Saya lebih lancar.

Kata Kunci Keywords: hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia

ABSTRACT

EconomicForeign debt has grown to be a significant part of the Indonesian economy since the 1997–1998 economic crisis. The impact of foreign debt on Indonesia’s economic growth from 2000 and 2021 is examined in this study. Regression analysis is used in this study to assess how foreign debt affects economic metrics including GDP, inflation, and exchange rates. Research indicates that while foreign debt may contribute to economic expansion in the near term, it may also provide long-term threats to economic stability. Furthermore, reliance on foreign debt may make sustainable fiscal policy more difficult. According to this study, in order to reduce the risks connected with foreign debt, rigorous debt management and domestic sector strengthening are necessary.I’m more lancar.

Keywords: foreign debt, Indonesia’s economic growth

Article history

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: Januari 2025

Plagirism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

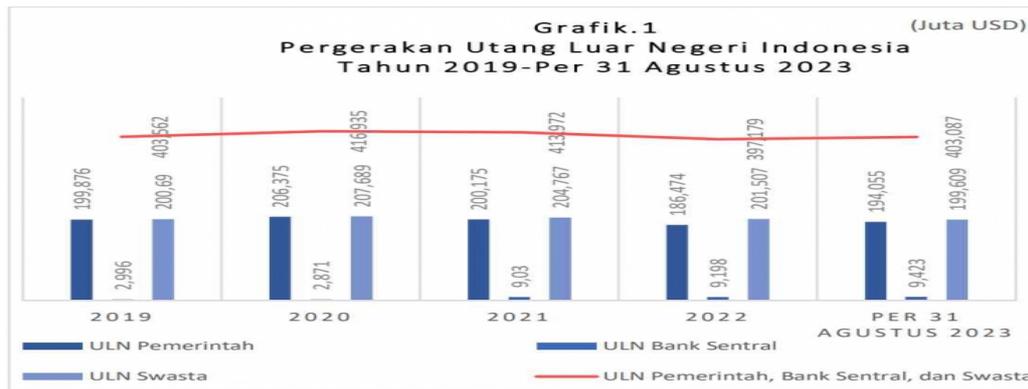
Indonesia, sebagai negara berkembang, memprioritaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Proses meningkatkan pendapatan riil per kapita dan sistem kelembagaan dalam jangka panjang dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi terbuka, pemerintah Indonesia terlibat dengan bisnis swasta dan pemerintah negara lain. Untuk membangun ekonomi yang merata dan sejahtera bagi masyarakatnya Indonesia pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Pengembangan ekonomi yang cepat dapat menunjukkan kemampuan sebuah negara dalam pembangunan. Pada akhirnya, kemajuan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada utang luar negeri.

Negara-negara berkembang menghadapi masalah utama dalam proses pembangunan setiap sektor, yaitu keterbatasan biaya pembangunan. Karena statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia harus mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan. Kelangkaan dana di lokal merupakan alasan utama mengapa Indonesia melakukan pinjaman ke luar negeri. Ada bukti bahwa pemerintah Indonesia pada masa lalu mulai melakukan utang luar negeri untuk mendapatkan dana tambahan untuk melunasi kekurangan dana pembangunan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa itu praktis dan dapat diperoleh dengan cepat, terutama untuk negara berkembang. Dalam situasi di mana negara menghadapi defisit anggaran, utang luar negeri dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meminjam dana, pemerintah dapat langsung menggunakannya untuk membiayai berbagai program atau proyek pembangunan yang berpotensi meningkatkan ekonomi. Meskipun demikian, utang luar negeri juga memiliki risiko yang signifikan. Jika pembayaran utang beserta bunga yang harus dibayar terlalu tinggi dan melebihi kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya, ini dapat membebani keuangan negara dan mengancam stabilitas ekonomi, terutama dalam hal neraca pembayaran yang semakin sulit untuk dikelola.

Kementerian Keuangan menganggap utang dapat diterima jika dikelola dengan baik. Semua utang pemerintah digunakan untuk membiayai investasi yang produktif dan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (n.d.), investasi ini akan sangat berdampak pada generasi berikutnya. Tulisan ini akan membahas hal ini.

Grafik berikut menunjukkan pergerakan utang luar negeri Indonesia dari 2019 hingga 2023:



Grafik (1) menunjukkan kecenderungan yang berbeda dalam utang internasional Indonesia dari pemerintah, Bank Indonesia, dan perusahaan swasta. Pada tahun 2020, Utang Luar Negeri mencapai titik tertingginya. Pada tahun 2023, utang Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk untuk pembelian obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis dari luar negeri (Kusnandar, 2023). Meskipun demikian, rasio utang Indonesia terhadap PDB tetap berada di level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 dan ASEAN. Pada Juli 2023, rasio utang Indonesia turun menjadi 37,8% dari PDB, lebih rendah dari 40,7% PDB pada tahun 2021. Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki utang sebesar 66,3% dari PDB, China 77,1%, dan India 83,1% (Hidranto, 2023).

Selanjutnya, batas aman rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 40% dan 80%, menurut IMF (Junaedi, 2018). Pada Juli 2023, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah 37,8%, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% dari PDB) (Syahputra, 2023).

LITERATUR RIEWIEW

Utang Luar Negeri: Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri adalah utang yang dibuat antara warga negara atau non-warga negara suatu wilayah teritori ekonomi. Dalam *Internal Debt Statistics: Guide for compilers and Users* (2003), International Monetary Fund memberikan penjelasan tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan utang luar negeri:

Utang luar negeri bruto adalah jumlah terutang dari kewajiban saat ini yang sebenarnya, bukan kewajiban kontinjensi yang memerlukan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh debitur pada titik waktu tertentu di masa depan dan yang terutang kepada non-residen oleh penduduk suatu ekonomi kapan saja.

Utang Luar Negeri (ULN) mencakup utang yang harus dibayar oleh suatu negara kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk pembayaran pokok maupun bunga yang jatuh tempo di masa depan. Utang ini bisa dalam mata uang negara peminjam atau dalam mata uang asing. Biasanya, negara mencari pembiayaan dari luar negeri ketika mereka kekurangan tabungan dalam negeri untuk membiayai pertumbuhannya.

Negara-negara maju sering memberikan modal kepada negara berkembang dalam bentuk pinjaman atau bantuan. Salah satu jenis utang luar negeri yang harus dibayar kembali adalah utang modal asing, yang merujuk pada tabungan luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan. Tabungan ini mencakup dana dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Sebagian besar tabungan resmi ini berasal dari hibah atau pinjaman lunak, yang biasanya menawarkan bunga lebih rendah dan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) adalah istilah teknis untuk jenis pendanaan ini, meskipun istilah "bantuan luar negeri" lebih sering digunakan untuk merujuk pada pendanaan semacam ini.

Bantuan luar negeri, yang wajib dibayar kembali, sering kali disebut sebagai utang luar negeri. Menurut World Bank (1992), utang luar negeri dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan kredit dari International Monetary Fund (IMF). Utang jangka pendek biasanya memiliki masa pinjaman kurang dari satu tahun, sementara utang jangka panjang memiliki durasi yang lebih panjang. Kredit dari IMF merujuk pada kewajiban yang harus dilunasi oleh negara penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Utang jangka panjang terbagi menjadi dua kategori utama: utang pemerintah dan publik yang dijamin, serta utang swasta yang tidak dijamin. Utang swasta yang tidak dijamin berarti utang yang dibuat oleh pihak swasta tanpa adanya jaminan dari pemerintah atau lembaga negara.

Utang yang dijamin oleh pemerintah perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi sebagian besar negara berkembang (NSB). Hal ini karena jika utang tersebut tidak dapat dibayar oleh pihak swasta, pemerintah negara akan menanggung konsekuensinya. Sementara itu, utang yang dijamin oleh lembaga pemerintah, meskipun berasal dari pihak swasta, berarti ada jaminan dari pemerintah untuk pembayaran utang tersebut.

Menurut para kreditur, utang yang dijamin oleh pemerintah dan publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kreditur yang memberikan utang bisa berasal dari sektor swasta maupun pemerintah, tergantung pada sumber dan jenis pendanaannya. Ada dua jenis utama dari pembayaran luar negeri yang berasal dari sumber resmi.

Pertama, ada pinjaman bilateral, yang merupakan pinjaman antara dua negara atau antara pemerintah satu negara dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti bank sentral. Kedua, ada pinjaman multilateral, yang melibatkan lembaga keuangan internasional seperti PBB, Bank Dunia, IGGI, dan bank-bank pembangunan regional yang memberikan pinjaman atau kredit kepada negara berkembang (NSB).

Selain itu, ada juga pengeluaran luar negeri yang berasal dari kreditur swasta, seperti pinjaman dari bank komersial, obligasi, dan sumber lainnya. Pinjaman ini diberikan oleh bank swasta dan lembaga keuangan swasta lainnya. Selain itu, ada juga jenis kredit yang diberikan oleh produsen, eksportir, dan pemasok produk lain, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan finansial negara atau entitas tertentu. Kredit-kredit ini membantu negara atau perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan, terutama untuk mendukung pengembangan dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang ada.

Makna Utang Luar Negeri

Jalur utang luar negeri dari negara industri (Utara) ke NSB (Selatan) memiliki beberapa makna untuk membiayai pembangun, termasuk:

1. Injeksi Modal

Peningkatan ekonomi yang didorong oleh bantuan luar negeri sering kali mengubah struktur ekonomi internal suatu negara. Meskipun pada awalnya dapat mengarah pada pertumbuhan yang tidak seimbang, kondisi ini dapat meningkatkan kebutuhan yang lebih besar. Namun, jika dana tambahan dari bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah, maka ekonomi negara peminjam tidak akan berkembang dengan baik. Penggunaan utang luar negeri yang tidak tepat bisa menyebabkan penumpukan utang yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Hal yang sama berlaku jika barang modal yang diperoleh digunakan untuk memproduksi barang mewah, yang sebenarnya hanya dibutuhkan oleh segelintir orang dalam masyarakat, bukan mayoritas penduduk.

Namun, arus masuk barang modal dan bantuan internasional tidak dapat dibandingkan. Hanya jika biaya pengembalian barang modal jauh lebih rendah daripada bunga komersial biasa, arus masuk barang modal dapat dianggap menguntungkan. Untuk mengevaluasi bantuan secara sosio-ekonomis, juga perlu dilakukan evaluasi dan evaluasi berbagai kemungkinan pengaruh dan konsekuensi. Misalnya, bantuan asing dapat menghalangi investasi bebas dan negara tidak dapat berkonsentrasi pada kapasitas produksi bebas. Peningkatan produksi dan akumulasi dana lokal akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan inflasi.

Jika bantuan bermanfaat digunakan dengan tidak tepat, itu akan menyebabkan masalah di masa depan. Proyek bantuan internasional akan meningkatkan sistem ekonomi lokal. Proyek bantuan luar negeri pasti menghasilkan hasil sosioekonomis, meskipun bunga yang dikenakan relatif kecil. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa sebagian besar dana bantuan diberikan dalam bentuk subsidi, yang berarti efek multipliernya tidak terlihat segera.

2. Penyaluran Surplus Ekspor

Negara donor sering kali memberikan bantuan luar negeri dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka sendiri. Ada beberapa alasan mengapa negara donor memberikan bantuan kepada negara-negara penerima. Pertama, negara donor mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kapasitas produksinya karena terbatasnya permintaan internal. Hal ini sering terjadi di negara-negara maju yang sudah berkembang, di mana barang-barang modal perlu dipindahkan atau ditransfer ke negara-negara penerima bantuan. Bagi negara donor, memberikan bantuan bisa menjadi cara untuk mengatasi masalah ekonomi mereka, seperti terbatasnya permintaan domestik. Kedua, ada juga situasi di mana negara donor tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi secara bebas, seperti yang terjadi di beberapa negara sosialis maju, di mana produksi sepenuhnya tersentralisasi atau diatur oleh negara.

Surplus ekspor negara donor memengaruhi pemberian bantuan internasional. Pemberian pinjaman, yang menguntungkan kedua belah pihak, adalah solusi utama untuk masalah ekonomi negara maju. Jika ekspor yang berlebihan dari negara maju dimanfaatkan, itu akan menghasilkan investasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Surplus berarti bahwa aktivitas ekonomi normal tidak berjalan dengan baik atau tidak termanfaatkan. Oleh karena itu, bantuan internasional berfungsi sebagai sumber investasi baru bagi NSB dan ekonomi yang lebih lancer, terutama dalam menyelesaikan kemacetan untuk mengirimkan surplus ekspornya. Meskipun devisanya agak tertunda, ini pasti akan berdampak sebagai injeksi baru bagi negara donor. Namun, jelas bahwa penyaluran memberikan manfaat bagi negara donor itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian jenis ini disebut penelitian deskriptif kualitatif. Dua metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi kepustakaan atau dokumentasi. Dalam studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan menganalisis berbagai catatan, buku, literatur, dan laporan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Data utama untuk penelitian ini berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh lembaga seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ULN Indonesia

Pada akhir triwulan keempat tahun 2020, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai 417,5 miliar dolar AS. Angka ini terdiri dari dua bagian utama: ULN sektor publik, yang mencakup bank sentral dan pemerintah, sebesar 209,2 miliar dolar AS, dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN, yang mencapai 208,3 miliar dolar AS. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan penurunan, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) yang sebelumnya mencapai 3,9 persen.

Berbeda dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ULN sektor swasta mengalami pelambatan. Hingga akhir triwulan keempat 2020, ULN swasta tumbuh hanya 3,8% (yoy), lebih rendah dari 6,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan utang dari perusahaan non-lembaga keuangan (PBLK) dan penurunan yang lebih signifikan pada lembaga keuangan (LK).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2020 tercatat 39,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio 38,1% pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar utang Indonesia, sekitar 89,1%, berupa utang jangka panjang, yang menunjukkan bahwa struktur utang negara tetap stabil. Ke depan, untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi, pengelolaan ULN akan terus dioptimalkan, dengan fokus untuk mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2021, cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, naik sebesar 6,56% menjadi US\$144,90 miliar, dibandingkan dengan US\$135,89 miliar pada tahun

sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kontribusi besar dari cadangan devisa tambahan yang mencapai US\$131,40 miliar. Rinciannya terdiri dari surat berharga senilai US\$118,34 miliar, uang kertas asing (UKA) dan simpanan sebesar US\$12,39 miliar, serta tagihan lainnya yang bernilai US\$672 juta. Selain itu, Indonesia juga memiliki special drawing rights (SDR) sebesar US\$7,79 miliar dan reserve position in the fund (RPF) sebesar US\$4,59 miliar.

Secara keseluruhan, cadangan devisa Indonesia menunjukkan tren yang positif dan stabil dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat mencapai posisi terendah pada 2018 dengan US\$120,65 miliar, cadangan devisa Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan mencatatkan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2021.

Tabel 1. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam (juta USD)

Kelompok Peminjam	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Pemerintah dan Bank Sentral</i>						
Pemerintah	137.396	154.875	177.318	183.197	199.876	206.375
Bank Sentral	5.212	3.408	3.304	3.078	2.996	2.871
<i>Swasta</i>						
Lembaga Keuangan	42.997	40.062	40.563	44.953	46.636	43.227
Bukan Lembaga Keuangan	125.125	121.661	131.284	144.202	154.054	164.462
Total	310.730	320.006	352.469	375.430	403.563	416.935

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Agustus 2020

Pemulihan keseimbangan eksternal Indonesia terus berlanjut. Secara keseluruhan, ketahanan eksternal Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada beberapa aspek terkait dengan Utang Luar Negeri (ULN) yang mengalami penurunan. Di satu sisi, perbaikan Neraca Pembayaran Internasional (NPI) yang tercermin dalam peningkatan dasar keuangan dibandingkan tahun lalu telah memberikan dorongan bagi peningkatan sumber pembiayaan jangka panjang untuk menutupi defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, cadangan devisa juga mengalami peningkatan, memperkuat ketahanan eksternal negara.

Namun, meskipun ada kemajuan ini, kebutuhan yang terus meningkat untuk pembiayaan eksternal melalui ULN menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Peningkatan ketergantungan pada utang luar negeri dapat menjadi ancaman bagi ketahanan eksternal Indonesia, karena semakin besar risiko yang harus dikelola agar tetap menjaga stabilitas perekonomian jangka panjang.

Dampak ULN terhadap Perekonomian

Pemulihan keseimbangan Indonesia dengan dunia luar masih terus berlangsung. Secara umum, indikator ketahanan eksternal menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada beberapa indikator terkait dengan Utang Luar Negeri (ULN) yang mengalami penurunan. Di satu sisi, perbaikan Neraca Pembayaran Internasional (NPI), yang tercermin dalam peningkatan dasar keuangan, telah meningkatkan sumber pembiayaan jangka panjang

untuk menutupi defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, cadangan devisa juga meningkat, memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Namun, ketahanan eksternal negara tetap menghadapi tantangan karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal melalui ULN.

Teori mengenai efek *overhang* hutang, yang dikemukakan oleh Krugman (1988) dan Sachs (1989), menjelaskan bahwa *overhang* hutang terjadi ketika banyak utang yang harus dibayar, tetapi nilai sekarang dari sumber pembayaran utang tidak cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Hubungan antara ULN dan pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui kurva pembayaran utang, yang menunjukkan bagaimana akumulasi utang memengaruhi pertumbuhan. Secara teori, ULN harus berada pada tingkat yang wajar. Selama jumlah utang tidak melebihi batas tertentu, penambahan utang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai titik tertentu, tambahan utang justru akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Tiga jenis penelitian empiris yang mengkaji pengaruh utang luar negeri (ULN) terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi efek *overhang* hutang, efek ketidakpastian, dan efek penghalang likuiditas (Addison, Hansen, dan Tarp, 2004; Bhattacharya dan Clements, 2004; Hammer dan Shelton, 2001; serta Elbadawi, 1997 dalam Arnone et al., 2005). Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan utang pemerintah yang dapat menyebabkan fenomena *crowding out*. Dalam teori ekonomi, ketika pemerintah menambah utangnya untuk membiayai pengeluarannya, sektor swasta dapat merasakan dampaknya. Peningkatan utang pemerintah berpotensi menyebabkan suku bunga naik, yang pada gilirannya akan mengurangi akses sektor swasta terhadap pembiayaan. Jika pengelolaan ULN tidak dilakukan dengan hati-hati, dampaknya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

.KESIMPULAN

- Utang luar negeri memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak sektor yang menyerap ULN, dan indikator pertumbuhan PDB terus menunjukkan peningkatan. Namun, pada titik tertentu, meskipun ULN bisa mendongkrak perekonomian, jika jumlahnya melampaui ambang batas Debt Service Ratio (DSR), dampaknya justru bisa menghambat. Hal ini terjadi karena semakin tinggi DSR, semakin besar dana yang dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang, sementara dana yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas.
- **Peran tabungan domestik** dalam mendukung pembiayaan pembangunan semakin penting. Mobilisasi dana ke dalam perekonomian Indonesia telah berjalan dengan baik, meskipun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi domestik yang besar. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara pengutang, salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah skema swap untuk membantu mengoptimalkan pembiayaan pembangunan di dalam negeri.

REFERENCE

Amoateng K. dan Amoako AB. 1996. Economic Growth, Export And External debt Causality: The Case of African Acountries, Applied Economics, Cilt 28, 21-27

- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1984. Ketergantungan dan Keterbelakangan. Jakarta: LSP.
- Arnone M, Bandiera L dan Presbito AF. 2005. External debt Sustainability: Theory and Empirical Evidence, Econ WPA.
- Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2015. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Edisi Desember
- Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2022. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Edisi Agustus
- Bank Indonesia. 2014. Laporan Perekonomian Indonesia.
- Bank Indonesia. 2020. Laporan Perekonomian Indonesia.
- Barro R. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, *Journal of Political Economy*, Vol. 98(5), 103-26
- Barro, J. Robert. 1974. "Are Government Bond Net Wealth?". *Journal of Political Economy*. Vol. 82 (6).
- Barro, J. Robert. 1989. "The Ricardian Approach to Budget Deficits". *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 3
- Darmawan, Indra. 1999. "Dampak Penghentian Bantuan IMF". *Harian Bernas*. Dimuat tanggal 30 September 1999.
- Darmawan, Indra. 1999. "Penghentian Pinjaman dari IMF". *Harian Suara Karya*. Dimuat tanggal 30 September 1999.
- Darmawan, Indra. 2000. "Sidang CGI, 1-2 Februari 2000: Antara Hutang dan Utang". *Harian Surya*. Dimuat tanggal 3 Februari 2000.
- Darmawan, Indra. 2016. "Defisit APBN dan Utang Luar Negeri". *Harian Kedaulatan Rakyat*. Dimuat tanggal 11 Maret 2016 halaman 12.
- Krugman P. 1988, *Financing*, *Economic Journal*, Vol 74, No.296, Blackwell Publishing.
- Kusnandar, V. B. (2023). Utang Luar Negeri Indonesia Naik 57% dalam Sedekade. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/utang-luar-negeri-indonesia-naik-57-dalam-sedekade>
- Hidranto, F. (2023). Indonesia.go.id - Anggaran Belanja 2024 Naik, Fokus Kesejahteraan Rakyat. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7356/anggaran-belanja-2024-naik-fokus-kesejahteraan-rakyat?lang=1>
- Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. *Simpodium Nasional Keuangan Negara*,1(1), 563–587. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/154>
- Syahputra, E. (2023). Utang RI Rp 7.805 T per Juni 2023, Aman Gak Nih? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230730133505-4-458469/utang-ri-rp-7805-t-per-juni-2023-aman-gak-nih>
- Pattillo C, Poirson H, Ricci L. 2002. External Debt And Growth, IMF Working Paper.
- Pattillo C, Poirson H, Ricci L. 2004. What Are The Channels Through Which External Debt Affects Growth, IMF Working Paper
- Sachs, JD. 1989, *The Debt Overhang of Developing Countries*, In *Debt Stabilization and Development*, by Calvo, Guillermo, Ronald Findlay, Pnetti Kouri dan Jorge Braga De Macedo (Oxford: Basil Balckwell)